

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI
KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nurmaini Sari Lumbantobing

NPP. 30.0125

Asdaf Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email: nurmainisari7@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Restu Widyo Sasongko, S.Pd., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The implementation of Regional Autonomy in the City of Sibolga has not been carried out optimally, so it is necessary to carry out an Analysis of Financial Ratios to Regional Original Income to measure the regional financial capacity of the City of Sibolga and analyze the inhibiting factors and efforts made to improve the regional financial capacity.* **Purpose:** *The purpose of this study was to determine the analysis of regional financial capacity in supporting the implementation of regional autonomy in Sibolga City, North Sumatra Province.* **Methods:** *This study uses Mahmudi's theory to measure the level of regional financial independence using four dimensions, namely the Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Dependence Ratio, Regional Financial Independence Ratio and Regional Original Revenue Management Effectiveness Ratio. The research approach used is qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques through interviews, observation and summary.* **Results:** *The results of the research show that the regional financial capacity of Sibolga City is not yet classified as good based on the results of the calculation of the Decentralization Degree Ratio, very high Regional Financial Dependence Ratio, very low Regional Financial Independence Ratio and Effective Regional Original Revenue Management Effectiveness Ratio .* **Conclusion:** *The implementation of Regional Autonomy in Sibolga City is still not optimal because there are obstacles, namely the target and realization of Regional Original Income which is still low, regional potential that has not been utilized optimally, and the high level of dependence of Sibolga City on transfer funds. Efforts made by the City of Sibolga are optimizing the utilization of regional potential, developing innovations in the process of regional taxation and levies as well as improving facilities and infrastructure.* **Keywords:** *Implementation of Regional Autonomy, Regional Financial Capacity, Regional Original Income* ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Sibolga masih belum dilakukan secara optimal sehingga perlu dilakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemampuan keuangan daerah Kota Sibolga serta menganalisis faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Mahmudi untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan empat dimensi, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Sibolga belum tergolong baik yang berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi yang kurang, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang sangat tinggi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang sangat rendah dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang efektif. **Kesimpulan:** Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Sibolga masih belum optimal dikarenakan terdapat hambatan yakni target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah, potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta tingginya tingkat ketergantungan Kota Sibolga terhadap dana transfer. Upaya yang dilakukan oleh Kota Sibolga adalah pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pengembangan inovasi dalam proses perpajakan dan retribusi daerah serta meningkatkan sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang telah diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Pada sistem ini, masyarakat memiliki kebebasan untuk turut berperan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai bentuk hak dan kewenangan sebagai warga negara Republik Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum yang dalam hal ini masyarakat Indonesia.

Otonomi daerah yang dilaksanakan menjadikan pemerintah daerah memperoleh sebagian hak dan kewenangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintah daerah, salah satunya desentralisasi. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berhak untuk menyelenggarakan pemerintahan,

menetapkan kebijakan, dan melakukan pengelolaan keuangan daerah, dengan dasar pertimbangan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,

Secara umum tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah, dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah, baik masyarakat maupun pejabat pemerintahan untuk berperan langsung dalam pembangunan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan dengan berdasar kepada laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari beberapa jenis rasio. Mahmudi (2019:140-141) mengemukakan bahwa untuk mengukur kemampuan keuangan dapat menggunakan analisis rasio keuangan dengan mengacu kepada indikator, yakni pendapatan asli daerah, rasio yang digunakan yaitu: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan, dan Rasio Kemandirian Keuangan serta Rasio Efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Kota Sibolga berdasarkan Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa secara keuangan Pemerintah Kota Sibolga masih sangat bergantung kepada bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang mana hal ini menunjukkan masih kurangnya kemandirian keuangan di Pemerintah Kota Sibolga. Melalui data yang telah tertera dapat dianggap bahwa masalah yang muncul melalui data tersebut dapat dianggap terkait Pendapatan Asli Daerah yang rendah dapat mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sibolga. Tentu apabila tidak

ditangani dengan cepat akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Faktor penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah disebabkan oleh masyarakat yang sebagai wajib pajak/retribusi tidak tertib dalam membayar pajak/retribusi. Pemerintah daerah kurang dalam meningkatkan investasi pemerintah contohnya Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Daerah belum mampu mengidentifikasi potensi kekayaan serta kurangnya fasilitas/sarana prasarana menunjang dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat disajikan berdasarkan pada Pendapatan Daerah yang memiliki kontribusi dari masing-masing jenis Pendapatan Daerah.

Tabel 1

Kontribusi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Sibolga Tahun 2017-2021.

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2017	641.144.963.392,78	114.315.663.634,78	17,8%
2018	697.755.443.293,23	122.338.287.031,58	17,5%
2019	643.240.051.780,97	87.568.068.437,97	13,6%
2020	625.407.542.812,09	88.936.953.076,09	14,2%
2021	609.443.390.610,28	99.452.144.127,28	16,3%

Sumber: LRA APBD Kabupaten Katingan Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa mulai tahun 2017-2021, total pendapatan daerah masih minim didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2017 kontribusi pendapatan asli daerah sebesar 17,8% kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 sebesar 17,5%, pada tahun 2019 mengalami penurunan Kembali sebesar 13,6% lalu di tahun 2020 meningkat sebesar 14,2% dan terakhir pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 16,3%. Bisa dilihat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir angka tertinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah berada pada angka 17,8% yakni pada tahun 2017, yang mana ini berarti kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pendapatan daerah Kota Sibolga masih minim. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui secara langsung bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sibolga terhadap bantuan dari Pemerintah masih cukup besar.

Tabel 2

Kontribusi Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sibolga Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Dana Perimbangan	Kontribusi
2017	612.679.629.340,40	527.581.578.811,00	86,11%
2018	665.076.728.098,12	556.947.357.266,00	83,73%
2019	672.973.628.679,58	544.898.421.146,00	80,96%
2020	600.495.355.707,00	512.948.553.524,00	85,42%
2021	590.998.535.142,00	489.211.928.943,00	82,77%

Sumber: LRA APBD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat kontribusi dana perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kota Sibolga masih terbilang sangat tinggi. Rata-rata kontribusi dana perimbangan berada pada

angka di atas 80%. Tingkat kontribusi dana perimbangan terbesar adalah pada tahun 2017 yakni sebesar 86,11%. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa secara keuangan Pemerintah Kota Sibolga masih sangat bergantung kepada bantuan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, yang mana hal ini menunjukkan masih kurangnya kemandirian keuangan di Pemerintah Kota Sibolga.

Melalui data tersebut dapat dianggap bahwa masalah yang muncul melalui data tersebut dapat dianggap terkait Pendapatan Asli Daerah yang rendah dapat mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Sibolga. Tentu apabila tidak ditangani dengan cepat akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu Penelitian Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Nias Selatan (Titisma & Anskaria, 2021). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nias Selatan masih kurang mampu. Jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah berada pada pola interval di atas 100% (tidak efisien) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Frederic W. Nalle, Kamilaus K. Oki, Putra M. M Sangaji 2021). Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan kemampuan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu derajat desentralisasinya menunjukkan bahwa tingkat kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi berada pada tingkat sedang, hal ini dikarenakan jumlah PAD yang masih relative kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Analisa Perkembangan Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Rifaldo Armando Tadris, Alvinson Sentinuwo 2018). Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif yang dapat mencakup hampir semua data non numerik. Hasil penelitian Keuangan Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu mendukung serta membiayai Otonomi Daerah atau Belanja Daerah yang ada di Kabupaten Sangihe namun ketergantungan dan perimbangan dari pemerintah Pusat sangat Besar. Penelitian Analisis Kemampuan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Sry Astuty 2021). Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan dalam penelitian penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil objek penelitian pemerintah daerah Kabupaten Majene. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kinerja yang kurang baik seperti pada rasio kemandirian keuangan dan rasio efektifitas. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Jayapura masih sangat tinggi ketergantungannya kepada pemerintah pusat, hal ini sebagaimana tergambar dari rasio ketergantungan keuangan dan desentralisasi fiskal. Penelitian Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya (Pratiwi & Irawan 2020). Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kota Palangka Raya yang ditinjau dari indikator Derajat Desentralisasi, Derajat Otonomi Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Kebutuhan Fiskal dan mengetahui perkembangan Total Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Total Belanja Daerah. Hasil Penelitian Berdasarkan analisa di atas memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Palangka Raya cenderung masih kurang. Oleh karenanya, perlu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, yakni dengan menggali

potensi daerah yang ada, sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah Kota Palangka Raya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang terletak pada fokus penelitian dan lokus. Berdasarkan dengan penelitian ini peneliti mengambil judul sesuai dengan permasalahan dan kesenjangan yang terjadi yaitu Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada lokus dan tahun dalam pelaksanaan penelitian yang mana setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda dibandingkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah di Kota Sibolga dalam kurun waktu yang dimaksudkan. Perbedaan lain adalah melalui teknik pengumpulan data dalam penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya data diperoleh hanya melalui wawancara dan dokumentasi sementara pada penelitian ini menambahkan proses observasi guna mendapatkan keakuratan dan keaktualan data yang akan digunakan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sibolga dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, Kepala Subbagian Program dan Keuangan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dan Investasi, serta ditambah dengan Staf dan Pelaksana Bidang Anggaran. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan mewawancarai 6 orang informan dan dokumentasi dari arsip Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga, Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Sibolga. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan yang digagas oleh (Mahmudi, 2019) yang menyatakan bahwa analisis rasio keuangan dalam mengukur kemampuan keuangan daerah menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melakukan analisis terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah di Kota Sibolga dengan menggunakan teori (Mahmudi, 2019) yang menyatakan bahwa untuk mengetahui besar tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditentukan dengan analisis rasio keuangan. Peneliti menggunakan 4 analisis rasio keuangan dari 9 analisis rasio keuangan dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Analisis rasio keuangan yang digunakan, yaitu Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat desentralisasi dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berguna untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio ini dihitung dengan adanya perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah.

Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Melihat rumus yang ada di atas, maka derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini APBD Kota Sibolga. Berikut perhitungan dan grafik rasio derajat desentralisasi Kota Sibolga:

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{114.315.663.634}{641.144.963.392} \times 100\% = 17,8\% \\ 2018 &= \frac{112.338.287.031}{697.755.443.293} \times 100\% = 17,5\% \\ 2019 &= \frac{87.568.068.437}{643.240.051.780} \times 100\% = 13,6\% \\ 2020 &= \frac{88.936.953.076}{625.407.542.812} \times 100\% = 14,2\% \\ 2021 &= \frac{99.452.144.127}{609.443.390.610} \times 100\% = 16,3\% \end{aligned}$$

Berdasarkan dengan hasil penulisan yang ada, yakni berdasarkan penjelasan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Sibolga, yang dapat disimpulkan bahwa kelemahan pemerintah daerah Kota Sibolga selama ini memang terletak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kelemahan tersebut termasuk kelemahan dalam mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelemahan dalam memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ada, terbukti dengan adanya target yang tidak terpenuhi realisasinya, serta kelemahan dalam manajemen penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan masih adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas dan sistem pembayaran pajak yang lebih memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran.

3.2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan dalam rasio Ketergantungan Keuangan Daerah digunakan demi mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer. Rasio ini memperlihatkan seberapa tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi. Cara menghitung tingkat ketergantungan Keuangan Daerah dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan ketergantungan/ketidakstabilan keuangan daerah yang signifikan akibat penerimaan dana dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rendahnya hasil rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin kecil ketergantungan

keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Rumus yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Melihat rumus di atas, maka Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya rasio, semakin tinggi pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan begitu pula sebaliknya. Berikut adalah table Pendapatan Kota Sibolga pada tahun 2017 sampai dengan 2021, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Sibolga 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 3

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	114.315.663.634	122.338.287.031	114.280.000.000	76.032.008.083	89.181.856.201
Pendapatan Transfer	520.434.133.811	561.087.198.405	544.898.000.000	512.949.000.000	489.212.000.000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.750.899.203	91.989.968.636	61.088.441.406	62.694.376.967	72.908.509.730
Total Pendapatan Daerah	641.144.963.392	697.755.443.293	643.240.051.780	625.407.542.812	609.443.390.610

Sumber: LRA APBD Kota Sibolga

Berdasarkan Tabel 4.2 Dapat dilihat sumber pendapatan daerah Kota Sibolga paling besar setiap tahunnya adalah Pendapatan Transfer dimana nominalnya lebih besar dua kali lipat atau lebih dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga. Pada tahun 2017 saja selisih antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer sebesar 400 Miliar Rupiah.

Berdasarkan data yang dimiliki dapat dihitung rasio Ketergantungan. Berikut perhitungan rasio ketergantungan daerah Kota Sibolga tahun anggaran 2017-2021 adalah sebagai berikut:

$$2017 = \frac{520.434.133.811}{641.144.963.392} \times 100\% = 81,17\%$$

$$2018 = \frac{561.087.198.405}{697.755.443.293} \times 100\% = 80,41\%$$

$$2019 = \frac{544.898.000.000}{643.240.051.780} \times 100\% = 84,71\%$$

$$2020 = \frac{512.949.000.000}{625.407.542.812} \times 100\% = 82,01\%$$

$$2021 = \frac{489.212.000.000}{609.443.390.610} \times 100\% = 81,74\%$$

Berdasarkan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah di wilayah Kota Sibolga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan hasil fluktuasi namun menunjukkan presentase yang sangat tinggi.

3.3. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah. Rasio dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan lain yang berasal dari sumber lain, yakni batuan pemerintah pusat dan provinsi maupun hibah. Dalam skala pembangunan ekonomi daerah, komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu dibandingkan adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga dengan penerimaan pendapatan yang berasal dari pihak eksternal yaitu selain Pendapatan Asli Daerah, pendapatan yang bersumber dari sumber lain (PAD). Kemandirian Daerah semakin tinggi rasionya maka semakin rendah ukuran kemakmuran wilayah relative terhadap suatu bangsa pihak luar, dan sebaliknya semakin rendah rasio ini semakin tinggi rasio daerah. Rumus yang dipakai guna mengetahui kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Melihat rumus di atas maka Rasio kemandirian Keuangan dapat menunjukkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah. Berdasarkan rumus di atas dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan konsep kunci dalam pembangunan ekonomi daerah dibandingkan dengan komponen lainnya, pendapatan dari eksternal pemerintah daerah akan berbeda. Berikut adalah daftar realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun anggaran 2017 hingga tahun 2021 yang bersumber dari laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga:

Tabel 4

Sumber Pendapatan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
Pendapatan Pajak Daerah	8.890.269.857	10.022.334.311	10.86.0350.641	10.388.634.400	10.828.577.558
Pendapatan Retribusi Daerah	5.197.936.267	5.142.837.510	5.391.012.510	4.617.176.690	6.359.644.410
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	15.476.558.306	15.183.146.574	10.228.263.880	11.236.765.019	9.355.412.428
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.750.899.203	91.989.968.636	61.088.441.406	62.694.376.967	72.908.509.730
Jumlah PAD	641.144.963.392	697.755.443.293	643.240.051.780	625.407.542.812	609.443.390.610

Sumber : LRA APBD Kota Sibolga 2017-2021, diolah penulis

Tabel 4.3 menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Kekayaan Daerah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah menunjukkan kondisi yang sangat fluktuatif. Pada setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga mengalami naik turun terlihat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yang mengalami fluktuasi yang sangat jelas terlihat setiap tahunnya pada jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga yang diterimanya. Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Sibolga tahun anggaran 2017-2021 adalah sebagai berikut:

$$2017 = \frac{78.845.440.000}{527.511.147.948} \times 100\% = 14,9\%$$

$$2018 = \frac{108.129.000.000}{566.947.695.266} \times 100\% = 19,07\%$$

$$2019 = \frac{114.280.000.000}{544.898.120.953} \times 100\% = 20,97\%$$

$$2020 = \frac{76.032.008.183}{512.948.281.943} \times 100\% = 14,82\%$$

$$2021 = \frac{89.181.856.201}{489.212.281.943} \times 100\% = 18,22\%$$

Berdasarkan hasil pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah di Kota Sibolga memiliki rata-rata 17,59%. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa daerah yang memiliki PAD tinggi akan memiliki kemandirian keuangan yang tinggi dan begitupun sebaliknya.

3.4. Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pengelolaan pendapatan Asli Daerah (PAD) memperlihatkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibandingkan dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi riil daerah. Apabila rasio efektivitas semakin tinggi, maka menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang semakin efektif. Rumus yang digunakan untuk melihat tingkat efektivitasnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dipakai untuk menghitung Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut data realisasi dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga tahun anggaran 2017-2021 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Sibolga periode 2017-2021:

Tabel 5

Sumber Pendapatan Daerah	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Realisasi Penerimaan PAD					
Pendapatan Pajak Daerah	8.890.269.857	10.022.334.311	10.86.0350.641	10.388.634.400	10.828.577.558
Pendapatan Retribusi Daerah	5.197.936.267	5.142.837.510	5.391.012.510	4.617.176.690	6.359.644.410
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	520.434.133.811	561.087.198.45	544.898.000.000	512.949.000.000	489.212.000.000

Yang Dipisahkan					
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.750.899.203	91.989.968.636	61.088.441.406	62.694.376.967	72.908.509.730
Jumlah PAD	641.144.963.392	697.755.443.293	643.240.051.780	625.407.542.812	609.443.390.610
Target Penerimaan PAD					
Pendapatan Pajak Daerah	8.890.269.857	10.022.334.311	10.86.0350.641	10.388.634.400	10.828.577.558
Pendapatan Retribusi Daerah	5.197.936.267	5.142.837.510	5.391.012.510	4.617.176.690	6.359.644.410
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	520.434.133.811	561.087.198.45	544.898.000.000	512.949.000.000	489.212.000.000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	84.750.899.203	91.989.968.636	61.088.441.406	62.694.376.967	72.908.509.730
Jumlah PAD	641.144.963.392	697.755.443.293	643.240.051.780	625.407.542.812	609.443.390.610

Sumber : LRA APBD Kota Sibolga 2017-2021

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga setiap tahunnya selalu tercapai. Berikut ini perhitungan dan grafik Rasio Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sibolga tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

$$2017 = \frac{103.672.203.938,17}{114.315.663.634,78} \times 100\% = 90,69\%$$

$$2018 = \frac{81.245.733.811,60}{122.338.287.031,58} \times 100\% = 66,41\%$$

$$2019 = \frac{69.312.217.832,16}{87.558.068.437,97} \times 100\% = 79,15\%$$

$$2020 = \frac{79.539.316.412,03}{88.936.963.076,09} \times 100\% = 89,43\%$$

$$2021 = \frac{76.263.787.133,27}{99.452.144.127,28} \times 100\% = 76,68\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio di atas, Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang tinggi yaitu memiliki rata-rata 80,47%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu mewujudkan penerimaan Daerah yang telah selesai sesuai target yang ditentukan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kemampuan keuangan daerah diukur berdasarkan hasil analisis rasio menunjukkan Kota Sibolga tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Analisis rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan keuangan Kota Sibolga yaitu Rasio Derajat Desentralisasi yang memiliki rata-rata 15,88% menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat kurang dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah Kota Sibolga. Kemudian sangat tingginya ketergantungan daerah atas pendapatan dari dana transfer umum dan bantuan keuangan hal ini dapat dilihat dari hasil rasio ketergantungan keuangan daerah yang memiliki rata-rata 15,88% . Kemandirian keuangan Kota Sibolga juga masih rendah

bahkan terjadi pola hubungan instruktif dimana peran pemerintah pusat begitu mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, hal tersebut terjadi dikarenakan rata-rata rasio kemandirian keuangan sebesar 17,59. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD Kota Sibolga yaitu berada pada angka 80,47%, menunjukkan bahwa Pemerintah daerah termasuk dalam kategori efektif dalam mengelola PAD.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor penghambat tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Sibolga yaitu, antara lain: Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi PAD yang masih rendah. Kemudian potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, yang mana banyaknya aktivitas perekonomian daerah yang belum dikenakan pajak dan retribusi. Serta tingginya tingkat ketergantungan daerah Kota Sibolga terhadap dana transfer, hal ini ditandai dengan tingkat kemampuan PAD rendah dibanding dana transfer umum yang masih sangat tinggi.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa hasil Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk mengukur kemandirian keuangan daerah Kota Sibolga yaitu Kota Sibolga belum mandiri. Adapun hambatan yang ditemukan pada penelitian ini ialah sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Adapun upaya yang telah dilakukan Kota Sibolga agar menjadi daerah yang mandiri ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga, meningkatkan sistem pelayanan yang berbasis digital, menambahkan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu lokasi yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini dilakukan agar menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sibolga sehingga dapat dilakukan penemuan yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Sibolga beserta jajarannya dan seluruh anggota Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kota Sibolga yang merupakan senior peneliti yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Dakhi, T. (2021). *ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUNGKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN NIAS SELATAN*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan, 4(2).
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN
- Manggu, S. A. R. (2019). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Majene*. Jurnal Akrab Juara, 4(1), 45-55.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., & Sangaji, P. M. (2021). *Analisis kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Inovasi, 17(1), 184-197.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga.
- Subianto, P., & Irawan, I. (2022). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya*. Edunomics Journal, 3(1), 31-43.
- Tandris, R. A., & Sentinuwo, A. (2019). *ANALISA PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH*. JURNAL ILMIAH EKBANK, 2(2).